

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU) Tanjung Priok masih dihadapkan oleh berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mewujudkan kemudahan pengadministrasian pemenuhan kewajiban pabean, khususnya proses *customs clearance* Importir Jalur Prioritas. Pada dasarnya, penerapan Sistem NSW telah mewujudkan kemudahan administrasi dalam hal kenyamanan dan kesederhanaan. Namun, dari segi kepastian (terutama pada kepastian hukum dan validitas data) dan efisiensi sebagian importir dan PPJK masih belum merasakan perubahan ke arah kemudahan pengadministrasian pemenuhan kewajiban pabean, khususnya proses *customs clearance*.
2. Beberapa kendala yang timbul pada penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas, antara lain ketiadaan aspek legal pada awal penerapan sistem, ketidaksiapan sistem secara teknis, kendala sistem dalam menginterpretasikan *Harmonized System* dan aturan Larangan dan Pembatasan (Lartas), kompleksitas sistem pelayanan kepabeanan, ketidaksiapan instansi pemerintah penerbit perijinan impor (OGA) dan masih adanya ketidakjelasan kewenangan pada OGA.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan Sistem NSW, sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem informasi kepabeanan seperti Sistem NSW, memerlukan pemahaman dan kesiapan dari para penggunanya karena jika tidak diantisipasi dengan baik akan menghambat bagi pencapaian tujuan sistem. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh instansi terkait dan para pengguna sistem untuk meningkatkan kesiapannya, baik secara teknis (komputer, internet dan server) maupun non-teknis (keterampilan sumber daya manusia pengguna sistem).
2. Guna meningkatkan pelayanan kepabeanan dalam Sistem NSW, sebaiknya pemerintah dan instansi terkait kembali melakukan sinkronisasi atas prosedur pelayanan dan regulasi dimasing-masing instansi terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses pelayanan kepabeanan.
3. Sebaiknya pemerintah melalui Tim Persiapan NSW terus melakukan sosialisasi secara intensif, baik kepada instansi terkait maupun kepada importir dan PPJK, sehingga ketidaktahuan dan keraguan terhadap penerapan sistem NSW dapat diminimalkan. Selain itu, sebaiknya Tim Persiapan NSW juga membuat suatu *call center* yang dapat dihubungi, sehingga baik instansi, importir maupun PPJK tidak mengalami kesulitan dalam mencari informasi mengenai NSW.